



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR:188.4/ 62. a /VII/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada Tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAN MEGAWANDI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :
TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 – 2022

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUGAS : Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

FUNGSI :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

NO.	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN	
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	Meningkatnya kebijakan dibidang otonom idaerah, administrasi kewilayahan, dan kerjasama	Persentase Urusan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi kepulauan Bangka Belitung yang memiliki	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi

		capaian kinerja dengan predikat Tinggi	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien di bidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah
			Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien di bidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien di bidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan, dan kerjasama	Persentase koordinasi yang dilaksanakan		
	Meningkatnya penyusunan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran	Persentase kebijakan yang disusun.	Meningkatnya pelayanan public di bidang keagamaan	Persentase fasilitasi keagamaan.

			Meningkatnya pelayanan public kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos yang terbantu.
			Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata
	Meningkatnya koordinasi dibidang kesejahteraan rakyat	Persentase koordinasi yang dilaksanakan		
	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum	1. Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum
		2. Persentase Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah		Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah
		3. Persentase Publikasi Produk hukum		Persentase publikasi produk hukum

	Meningkatnya koordinasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan		
	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang administrasi perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan yang disusun	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam
	Meningkatnya koordinasi di bidang administrasi perekonomian	Persentase koordinasi yang dilaksanakan		
	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang pembangunan daerah	Persentase kebijakan pengendalian pembangunan yang disusun	Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang memanfaatkan
	Meningkatnya koordinasi di bidang pembangunan daerah	Persentase koordinasi yang akan dilaksanakan		

	Meningkatnya penyusunan kebijakan dibidang Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan pengadaan secara Elektronik	Jumlah Kebijakan yang disusun.	Tercipatanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement
	Meningkatnya pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik	Persentase kondisi kemandirian kinerja pengadaan barang/jasa dan pengadaan secara elektronik yang memenuhi kriteria timeless (tepat waktu)		
	Meningkatnya penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan, tataaksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan public serta peningkatan kinerja organisasi	Jumlah Kebijakan kelembagaan dan Analisa jabatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB
				Persentase pola pikir dan budaya kerja
				Persentase menurunnya resiko kegagalan
			Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien)

			Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda
			Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja
Meningkatnya koordinasi dibidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan public serta peningkatan kinerja organisasi	Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat			
Meningkatnya penyusunan kebijakan yang ditetapkan dibidang rumah tangga, keuangan, dan asset setda	Jumlah kebijakan yang disusun	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumah tanggaan		Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumah tanggaan
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan		Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan		Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan
Meningkatnya koordinasi bidang rumah tangga, keuangan, dan asset Setda	Persentase penerima layanan pemerintahan			

	Meningkatnya kebijakan serta peran kehumasan /keprotokolan yang efektif dan berkualitas	Persentase kebijakan pelayanan publik yang dicapai	Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik
			Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani
	Meningkatnya koordinasi kehumasan dan keprotokolan yang efektif	Persentase koordinasi kehumasan dan keprotokolan yang efektif		

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



ANGGAWANDI